

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP  
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA."Pratiwi Mardijani  
Dosen FIA Univ.Pawiyatan Daha Kediri**Abstract**

*In the Preamble of the 1945 Constitution made clear that the Indonesian government in running the development process that covers the entire nation and the entire country of Indonesia. Then the responsibility of development is a responsibility of all walks of Indonesia. A development process was clear that an active government role in a planned and implemented and sustained. Development in Indonesia covers all aspects of life, both in aspects of political, economic, social and cultural. Development will be successful if an activity that involves the participation of all communities within a country. Not only from the highest policy-making, planning, leadership, operational executor but also from the fishermen, laborers, farmers, small traders and others. So that development not only for the group or part of certain communities but to all citizens.*

**Key words:** partisipasi, masyarakat, pembangunan.

Terlibatnya sebuah rakyat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan konsekuensi dari struktur kehidupan sosial yang betakar dan berkembang di Indonesia. Keberhasilan pembangunan juga dapat dilihat dari sejauh mana partisipasi, prakarsa dan swadaya masyarakat desa itu dan juga dapat dilihat dari hasil-hasil pembangunan desa. Maka tidak boleh dilupakan bahwa masyarakat desa itu sendiri yang mengetahui pokok permasalahan yang ada dipedesaan adalah masyarakat desa itu sendiri.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu tidak saja berbentuk penerimaan hasil-hasil pembangunan dengan cara memelihara dan memakai saja. Tapi juga harus berbentuk peran aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dalam kaitanya dengan pembangunan ini, daerah pedesaan (termasuk masyarakatnya) dijadikan obyek sekaligus subyek pembangunan. Sebagai subyek desa adalah sasaran pembangunan dan sebagai wadah pengembangan kehidupan masyarakat. Sebagai obyek desa diharapkan turut aktif dalam membina dasar kehidupan bernegara dan masyarakat itu sendiri diharapkan dapat berfungsi sebagai penggerak pembangunan.

Perlu dipahami dan didalami bahwa desa yang hendak dibangun adalah desa dengan segala aspek kehidupan dan penghidupannya. Karena desa disamping sebagai obyek dan subyek

pembangunan, dimana masyarakat dapat juga dibantu sebagai penggerak, baik dalam tahap perencanaan pembangunan desa maupun tahap pelaksanaan pembangunan desanya.

Pembangunan dewasa ini masih ada beberapa masalah dan kelemahan, antara lain :

a. Kemampuan masyarakat desa untuk melakukan perencanaan pembangunan masih rendah.

b. Partisipasi masyarakat masih bertitik tolak pada partisipasi dalam memikul beban pembangunan, dilain pihak partisipasi dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan dari penerimaan hasil-hasil pembangunan masih rendah.

c. Prakarsa untuk melakukan tindak lanjut dari pada terbangunnya pembangunan desa berupa usaha pemeliharaan penggunaan, penggunaan bangunan proyek masih langka dan sukar dibangkitkan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan desa masih menghadapi masalah-masalah antara lain :

a. Banyak daerah pedesaan yang tingkat perkonomiannya masih rendah.

b. Banyak daerah yang masih belum menikmati hasil pembangunan terutama bidang pendidikan.

c. Banyak pemuda desa yang meninggalkan desa menuju kota sehingga desa

kekeringan tenaga produktif.

Sehubungan dengan gagasan pembangunan dari bawah dimaksudkan agar rakyat di tingkat bawah dapat turut ambil bagian atau berpartisipasi didalam pembangunan desa, dalam hal ini partisipasi tidak hanya dilakukan oleh organisasi masyarakat, terutama golongan-golongan kepentingan atau kelompok profesi, tetapi yang paling penting adalah warga masyarakat dapat membangun kesediaan partisipasinya dalam berbagai kebijaksanaan, kegiatan dan program pemerintah.

#### Partisipasi Masyarakat Desa

Pembangunan Nasional Negara Indonesia bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Pembangunan masyarakat adalah merupakan suatu pendekatan yang sering kita dengar dan didesagungkan oleh pemerintah, sebagai suatu pendekatan pembangunan yang mempunyai tujuan untuk memajukan kehidupan masyarakat. Pembangunan masyarakat sebagai alat pendekatan dalam rangka memajukan dan meningkatkan taraf hidup, maka dari itu sasaran pembangunan itu sebenarnya adalah manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa sasaran utama pembangunan adalah manusia maka dari itu sangat berkaitan dengan adanya peran serta atau partisipasi masyarakat.

#### Pengertian Partisipasi

Secara etimologis perkataan partisipasi berasal dari Bahasa Latin yaitu "participare." Dari Bahasa Latin tersebut kemudian diambil alih dalam Bahasa Inggris yaitu "to participate." Kemudian keduanya diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yang mempunyai makna yang sama yaitu mengambil bagian atau turut serta.

Menurut Theodorsen dalam Aris mengemukakan bahwa : "Partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu." (<http://uisiindonesia.blogspot.com>)

Dewasa ini partisipasi sering dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan. Istilah partisipasi

tersebut akan lebih jelas maknanya apabila secara langsung dikaitkan dengan gerak pembangunan itu sendiri. Dari uraian di atas jelas sudah bahwa partisipasi dan pembangunan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dari kaitan itu maka akan menumbuhkan kesadaran masyarakat desa agar mereka tergerak untuk mengadakan perubahan secara aktif dan menuju kearah yang lebih baik.

Dari uraian tersebut di atas maka dapatlah dimengerti bahwa pembangunan itu memuat adanya partisipasi dan masyarakat yang menjalankan pembangunan itu.

Koentjaraningrat (2000) menyebutkan ada dua tipe partisipasi yang pada prinsipnya berbeda.

Yang dikatakan sebagai berikut :

"Partisipasi rakyat, terutama rakyat pedesaan, dalam pembangunan itu sebenarnya menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda, ialah :

1. Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bernamam-sama proyek pembangunan yang khusus.
2. Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan."

Pada tipe partisipasi yang pertama, rakyat pedesaan diajak, diperintahkan oleh pemimpin desa atau wakil-wakilnya untuk ikut serta menyumbangkan tenaga atau hartanya dalam menunjang keberhasilan pembangunan proyek yang bersifat khusus. Biasanya proyek yang demikian bersifat suk, contohnya partisipasi masyarakat desa membantu mengerjakan proyek irigasi bantuan desa, irigasi penghijauan dan melubarkan desa.

Sedangkan pada tipe kedua, tidak ada aktivitas bersama yang khusus, tetapi ada program pembangunan yang sangat membutuhkan partisipasi masyarakat atas kesadaran atau atas kesadaran individual. Dalam hal ini contohnya adalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan modal nasional yaitu Tabanas, Program Keluarga Berencana.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya dua tipe partisipasi itu mempunyai prinsip berbeda. Pada tipe yang pertama tumbuhnya partisipasi dari rakyat pedesaan belum secara spontanitas timbul, namun mereka masih perlu untuk diajak, dibujuk,

diperintah atau bahkan dipaksa oleh pihak atas, agar mereka memberikan partisipasinya secara fisik maupun non fisik. Sedangkan dalam tipe kedua, partisipasi cenderung atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Jadi pada tipe partisipasi yang kedua ini timbul berdasarkan atas keputusan mereka sendiri sebagai individu yang utuh.

Jadi pada dasarnya bahwa partisipasi itu dilakukan dengan prinsip kesukarelaan dari pihak masyarakat, tanpa adanya paksaan dari pihak maupun juga. Selain daripada itu tidak ada sanksi fisik bila tidak melakukan kegiatan partisipasi tersebut. Yang ada hanyalah sanksi moral terhadap individu yang tidak melakukan partisipasi tersebut.

#### Pengertian Masyarakat

Karena dalam pembangunan desa itu sangat menyangkut masyarakat, maka perlu dimengerti terlebih dahulu pengertian dari masyarakat. Adapun yang dimaksud masyarakat. Menurut Sumartono "Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan." (<http://amileboya.blogspot.com>)

Sedangkan menurut Koenjaramingrai (2009): "Masyarakat adalah kesatuan hidup yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama."

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah dan memiliki suatu kebudayaan dan adat istiadat tertentu serta terikat oleh suatu aturan yang berlaku.

Jadi masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga pergaulan hidup itu timbul berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa seseorang dan yang lain saling kenal mengenal dan pengaruh mempengaruhi.

Partisipasi masyarakat menurut Hefifah Sj. Soemanto (2003) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok social dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Sedangkan menurut Cotyars (1991) menyebutkan tiga alasan

mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak Negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. (<http://trindusup.blogspot.com>)

#### Pengertian Desa

Pembangunan desa merupakan integral dari Pembangunan Nasional yang mempunyai makna strategis, sebab desa secara keseluruhan merupakan basis ketahanan nasional bagi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan desa adalah: "Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Berdasarkan pengertian di atas, maka desa adalah sekelompok manusia yang tergabung dalam kesatuan masyarakat hukum dan berempati tinggal di suatu masalah yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan serta memiliki pemerintahan yang hendak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Setelah dikemukakan beberapa pengertian dan batasan di atas, kemudian akan dibahas tentang pembangunan.

Menurut Siagian memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai: "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan

bangsa (*nation building*).” (<http://profisyamsiah.wordpress.com>)

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses yaitu kegiatan yang terus menerus dilaksanakan. Selain itu pembangunan juga merupakan usaha yang secara sadar untuk mengadakan perubahan untuk menaja ke suatu keadaan yang lebih baik, dimana pembangunan itu tidak hanya pada bidang tertentu saja melainkan juga dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Dari pengertian yang dikemukakan oleh Sugian tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

a. Pembangunan itu merupakan usaha yang dilakukan secara sadar.

b. Pembangunan itu merupakan suatu proses yang harus terus menerus dilak-

kan dilaksanakan meskipun secara bertahap dalam periode tertentu.

c. Pembangunan itu dilaksanakan secara berencana serta berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.

d. Pembangunan itu mengarah kepada modernitas, yang diartikan sebagai cara

hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta berkemampuan untuk

mengembangkan hidupnya secara nasional.

e. Modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional, artinya berbagai aspek kehidupan.

Setelah mengetahui pengertian dan batasan daripada desa dan pembangunan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pembangunan Desa itu adalah suatu bentuk pembangunan yang didalamnya terdapat keikutsertaan yang dilakukan oleh warga obyekt pembangunan tersebut. Dan selain daripada itu pembangunan yang dilakukan tersebut mempunyai sifat yang menyeluruh. Yang artinya meliputi segala aspek kehidupan rakyatnya. Baik kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batiniah.

Pembangunan Desa itu diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dalam menunjang proses pembangunan yang sedang digalakan.

Tujuan Pembangunan Desa adalah untuk menaikkan taraf hidup masyarakat yang

bersangkutan dan karena kita hidup berdasarkan Pancasila maka tidak mengherankan bila proses pembangunan tersebut juga harus berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila.

#### Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Pembangunan Desa

Suatu pembangunan akan berhasil jika masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena pembangunan merupakan suatu yang mengarah pada perubahan maka Bloom dan Fischer dalam Adimihardja (2004) mengemukakan bahwa ada beberapa hak masyarakat untuk mengetahui dan terlibat dalam setiap aspek perubahan, yaitu :

a. Berhak mengetahui masalah apa yang ada (dari perspektif praktisi) dalam bahasa yang jelas dan dapat dimengerti.

b. Berhak berpartisipasi dalam memilih tujuan dan sasaran.

c. Berhak mengetahui apa yang akan terjadi selama proses intervensi, siapa yang melakukan, siapa melakukan untuk siapa dan dibawah kondisi apa ?

d. Berhak mengetahui berapa lama kegiatan paling lama dilakukan.

e. Berhak mengetahui metode-metode alternatif dalam membahas permasalahan dan kemungkinan-kemungkinannya dalam memecahkan kesulitan yang terjadi.

f. Berhak mengetahui seberapa besar kegiatan itu dapat membantu dan mengetahui nilai pelayanan yang tersedia.

g. Berhak mengetahui catatan-catatan yang disimpan dan siapa yang boleh melihatnya.

h. Berhak mengetahui lebih dahulu terminasi pelayanan.

i. Berhak mengambil kendali atas kehidupan dan semampunya.

j. Berhak menjadi bagian dari dan diinformasikan tentang evaluasi mengenai situasi dirinya, agar ia mendapat dan mengambil keputusan berdasarkan data tersebut.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat berperan. Hal ini berarti pelaksanaan pembangunan nasional tidak hanya merupakan tugas dari pemerintah. Pembangunan merupakan tugas dan tanggung jawab dari seluruh masyarakat. Dengan demikian pembangunan

akan berhasil apabila melibatkan semua golongan dan lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan disamping bantuan ataupun prakarsa dari pemerintah.

Pada UU No. 32 (2004) tentang pemerintah Daerah dijelaskan bahwa: "Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk membiayai pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat."

Walaupun akhir-akhir ini, konsep pembangunan lebih mengarah pada meningkatkan partisipasi masyarakat tetapi banyak sekali pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan konsep yang direncanakan.

Seperti yang diterangkan oleh Adimihardja (2004) bahwa:

"Pola kebijakan yang selama ini dilaksanakan lebih kuat datang dari atas ke bawah daripada dari bawah ke atas. Tetapi pola atas-bawah ini sederhana rupanya telah mengalami pergeseran paradigma yang mengatah pada keterlibatan semua tingkat dalam kerangka pembangunan partisipatif yang diefektifkan oleh adanya pembagian peran yang jelas pada masing-masing tingkat, yang mengacu pada prinsip semakin ke atas memiliki kewenangan yang lebih luas dalam hal kebijakan, sedangkan semakin ke bawah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam hal operasionalisasi program pembangunan."

Dalam kondisi demikian diharapkan masyarakat menjadi semakin memperoleh peluang dan dorongan untuk menunjukkan inisiatif dan kreatifitas dalam mengatasi permasalahan yang muncul disekitarnya terutama mengenai pembangunan.

Kondisi tersebut mencerminkan perlu adanya pergeseran peran pemerintah, dari peran selama ini yang cenderung sebagai penyelenggara pelayanan sosial (*social service provider*) menjadi fasilitator, mediator, koordinator, pendidik, mobilisator, sistem pendukung dan peran-peran yang lain yang lebih mengarah pada pelayanan tidak langsung. Sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat optimal.

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa partisipasi yang berasal dari masyarakat desa itu sendiri sangat diharapkan peranannya dalam rangka melaksanakan

pembangunan di daerah mereka sendiri. Namun yang perlu juga mendapat perhatian adalah jangan sampai terjadi bahwa dengan adanya partisipasi ini masyarakat justru menjadi pihak yang dirugikan. Sebab seringkali model pembangunan yang top down hanya menekankan target kuantitas saja tanpa memikirkan kualitas proyek. Hal inilah yang seringkali menurunkan semangat partisipasi dari masyarakat.

Maka dari itulah dibutuhkan langkah-langkah yang positif untuk memunculkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Sehingga antara pemerintah dengan masyarakat terjadi kerjasama yang harmonis dalam mewujudkan cita-cita pembangunan desa.

#### Partisipasi dalam Pembangunan Desa

##### Tahap-tahap Partisipasi

Uraian dari masing-masing tahapan partisipasi menurut Turinda adalah sebagai berikut:

##### a. Tahap-tahap Partisipasi

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan sifat kebonaiban kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung didalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayahnya.

##### b. Tahap Partisipasi dalam Perencanaan Kegiatan

Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup perumusan tujuan, maksud dan target.

##### c. Tahap Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai dan sebagainya.

##### d. Tahap Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengemukakan informasi yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan serta perilaku syarat pembangunan.

#### c. Tahap Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Kegiatan

Partisipasi dalam hal pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat. Dengan itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.<sup>7</sup>

(<http://tarindaatp.blogspot.com>)

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa partisipasi sangat diperlukan. Hanya saja minat untuk ikut serta dalam pembangunan pada masyarakat Indonesia masih rendah. Oleh karena itu ada beberapa hal yang penting dalam syarat tumbuhnya partisipasi.

#### Syarat Tumbuh Partisipasi

Menurut Slamet dalam Aziz menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok, yaitu:

1. Adanya kemauan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi.
2. Adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi.
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

(<http://tarindaatp.blogspot.com>)

Kalau kita melihat dari uraian pendapat di atas, maka masyarakat desa akan merasa kesulitan dalam menumbuhkan rasa partisipasinya dalam pembangunan. Karena pada umumnya masyarakat desa lebih mengutamakan sistem partisipasi *top-down*. Hal ini disebabkan masih ada beberapa kendala yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan.

Dengan adanya partisipasi dari seluruh masyarakat desa itu, maka merupakan sumbangan penting bagi berhasilnya

Pembangunan Nasional. Hal ini telah sesuai dengan apa yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945.

#### Kesimpulan

1. Bahwa dalam usaha untuk mendorong partisipasi masyarakat serta dalam usaha memberikan pengarahan kepada masyarakat peranan Kepala Desa sangat diperlukan.
2. Bahwa suatu masyarakat Desa yang masih memegang teguh dan memelihara sistem gotong royong, maka partisipasi masyarakat akan terlaksana dengan baik.
3. Dengan ikut berpartisipasi dalam pembangunan baik dalam bentuk dana, tenaga, ide maupun dalam pengambilan keputusan serta dalam perrealisasiannya, akan membuat suatu desa maju dalam pembangunan. Walaupun tingkat partisipasi desa yang satu dengan desa yang lain berbeda-beda, hal ini dikarenakan adanya kesadaran yang tinggi dari warga karena adanya kekompakan antara aparat pemerintahan desa dengan masyarakatnya yang hasilnya dapat secara langsung dan nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat.
4. Dengan adanya partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan hasil yang telah dicapai dalam pembangunan dapat dinikmati serta dimanfaatkan masyarakat.

\*\*\*\*\*

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budi, Santoso, 1998, *Peranan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa*, UPD, Kediri
- Ku, Adimahanja, 004, *Participatory Research Appraisal dan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Edisi Kedua, Bandung Humaniora Utama Press
- Koentjaraningrat, 2000, *Kebudayaan Mentalitas dan Kebudayaan*, Edisi Kesembilan Belas, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Halim, Abé, 2008, *Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan*, Edisi Pertama, Malang, Bayu Media Publishing
- Internet

\_\_\_\_\_ "*Pengertian Partisipasi*",  
diakses pada tanggal 4 Juli 2011 pukul  
09.33 di <http://www.kompas.com>

\_\_\_\_\_ "*Pengertian Pembangunan*",  
diakses pada tanggal 4 Juli 2011  
pukul 09.45 di <http://www.kompas.com>